

The Influence of Minimum Wage, Farmers' Exchange Rate, and Inflation on the Number of Poor People through Regional Gross Domestic Product in South Kalimantan Province

Pengaruh Upah Minimum, Nilai Tukar Petani, dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Melalui Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Selatan

A. Baihaki¹, Noor Rahmini²

Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

¹2320317310007@mhs.ulm.ac.id, ²noorrahmini@ulm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of the Provincial Minimum Wage, Farmers' Exchange Rate, and Inflation on the Number of Poor People through the Regional Gross Domestic Product in South Kalimantan Province. This research is a descriptive associative quantitative study utilizing secondary timeseries data obtained from the BPS of South Kalimantan Province for the 2010–2024 period. The data analysis technique used is Path Analysis. The results of the study show that, both partially and simultaneously, UMP and NTP have a positive and significant effect on GRDP, whereas Inflation has a negative and significant effect on GRDP. Partially and simultaneously, UMP, NTP, and GRDP have a negative and significant effect on the Number of Poor People, while Inflation has a positive and significant effect. Furthermore, the Sobel test and path analysis results demonstrate that GRDP significantly mediates the influence of UMP, NTP, and Inflation on the Number of Poor People in South Kalimantan Province.

Keywords: Provincial Minimum Wage, Farmers' Exchange Rate, Inflation, Gross Regional Domestic Product, Poverty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UMP, NTP, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif asosiatif menggunakan data sekunder data *time series* dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010–2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Path Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan UMP dan NTP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. UMP, NTP, dan PDRB secara parsial dan simultan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, sedangkan Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil uji Sobel dan analisis jalur, PDRB terbukti secara signifikan memediasi pengaruh UMP, NTP, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Kemiskinan.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan serta mampu menurunkan kemiskinan. Dalam kondisi ideal, peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkatkan daya beli petani, inflasi tetap stabil, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh konsisten sebagai indikator kapasitas ekonomi daerah. Namun, kondisi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Pada 2024, ekonomi tumbuh sebesar

4,81%, sedangkan kemiskinan masih sebesar 4,11% atau 183,31 ribu jiwa dan hanya turun 0,18 poin persentase dibandingkan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa efek *trickle-down* pertumbuhan ekonomi belum optimal.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan Kalimantan Selatan meningkat pada 2021 akibat pandemi, kemudian menurun hingga 2024. Persentase kemiskinan turun dari 4,83% pada 2021 menjadi 4,11% pada 2024, sementara jumlah penduduk miskin turun dari 209.108 menjadi 183.307 jiwa. Meskipun berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,57%, jumlah penduduk miskin masih menjadi persoalan yang perlu ditangani. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan kemiskinan sebesar 4,00% pada 2024, tetapi realisasinya 4,11%. Selain itu, target kemiskinan ekstrem 0% sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 belum tercapai karena masih sebesar 0,13%, disertai kesenjangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 0,77%. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs poin 1, yaitu *No Poverty*.

Secara teoritis, Todaro & Smith (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan melalui efek *trickle-down*, tetapi manfaatnya tidak selalu merata apabila distribusi pendapatan timpang. Di Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan industri pengolahan mendominasi PDRB, sedangkan sektor pertanian dan pekerjaan informal masih menghadapi keterbatasan produktivitas. Oleh karena itu, UMP, NTP, dan inflasi menjadi faktor penting yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Data BPS menunjukkan bahwa UMP meningkat dari Rp2.877.448 pada 2020 menjadi Rp3.282.812 pada 2024, sedangkan NTP meningkat dari 100,98 menjadi 114,35. Inflasi berfluktuasi, mencapai 6,99% pada 2022 sebelum turun menjadi 1,95% pada 2024, sementara PDRB meningkat dari Rp130.864,32 miliar menjadi Rp156.756,94 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi, tetapi masih terdapat tekanan terhadap daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Menurut teori upah efisiensi Shapiro & Stiglitz (1984) dalam Wibowo (2022), peningkatan upah dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas, tetapi kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas berpotensi menimbulkan pengangguran. Sementara itu, Mellor (2017) melalui *Theory of Agricultural Development* menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan petani melalui NTP dapat memberikan efek pengganda terhadap ekonomi pedesaan dan mengurangi kemiskinan. Dari sisi inflasi, Friedman (1970) dalam Priyono & Ismail (2012) menjelaskan bahwa inflasi dapat menurunkan nilai riil pendapatan dan daya beli masyarakat. Dalam konteks Kalimantan Selatan, inflasi pangan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi daerah (BPS, 2024). Di sisi lain, *Phillips Curve* menunjukkan bahwa inflasi moderat dapat mendorong produksi dan kesempatan kerja, sehingga hubungan inflasi dengan kemiskinan perlu diuji melalui jalur pertumbuhan ekonomi.

PDRB digunakan sebagai variabel mediasi karena mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dan menjadi jalur yang menghubungkan UMP, NTP, dan inflasi dengan kemiskinan. Perubahan upah, pendapatan petani, dan stabilitas harga dapat memengaruhi aktivitas produksi, konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja yang kemudian tercermin dalam PDRB. Dengan demikian, peran PDRB penting untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan mampu meneruskan manfaat perubahan variabel makroekonomi kepada masyarakat.

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Livenchy K. Manangkalangi et al. (2020) dan Sulistiawan (2023) menemukan bahwa PDRB dan

UMP dapat menurunkan kemiskinan, sedangkan Syahputri & Fisabilillah (2023) serta Lavenia et al. (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan UMP justru meningkatkan kemiskinan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata. Sayuti & Taqiuddin (2020) dan Fatimah & Sa'roni, (2020) menunjukkan bahwa peningkatan NTP mampu menekan kemiskinan, sementara Syafrina (2023) dan Wiryawan & Pratiwi (2024) menemukan pengaruh inflasi dan UMP yang berbeda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap, karena belum terdapat kesimpulan yang konsisten mengenai hubungan UMP, NTP, inflasi, dan kemiskinan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dengan PDRB sebagai variabel intervening, khususnya di Kalimantan Selatan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan data selama 2010–2024, termasuk periode pascapandemi, untuk menganalisis pengaruh UMP, NTP, dan inflasi terhadap kemiskinan melalui PDRB.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Nilai Tukar Petani, dan Inflasi terhadap Kemiskinan melalui Produk Domestik Regional Bruto di Kalimantan Selatan” penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai jalur pengaruh faktor makroekonomi terhadap kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan upah pekerja, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga.

2. Metode

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ranah ekonomi pembangunan dengan fokus pada hubungan Upah Minimum, Nilai Tukar Petani (NTP), inflasi, dan kemiskinan, serta peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel intervening. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif asosiatif dengan *path analysis* berbasis data *time series* di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2010–2024. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif asosiatif untuk menganalisis perkembangan dan hubungan antara Upah Minimum, NTP, inflasi, PDRB, dan kemiskinan di Kalimantan Selatan selama 2010–2024. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel dari tahun ke tahun, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu Upah Minimum, NTP, dan inflasi, terhadap kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB sebagai variabel intervening (Sugiyono, 2019). Data penelitian berbentuk *time series* selama 15 tahun dan diharapkan menghasilkan temuan yang objektif, valid, serta reliabel sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Creswell, 2018).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data sekunder periode 2010–2024 yang diperoleh dari situs resmi BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan objek analisis berupa data ekonomi makro dan kemiskinan selama periode 2010–2024.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan menelaah sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, publikasi BPS, serta literatur dari lembaga resmi dan sumber internet yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder. Periode observasi mencakup tahun 2010–2024 untuk memperoleh gambaran tren ekonomi yang lebih stabil dan komprehensif. Tahun 2025 tidak digunakan karena sebagian data tahunan belum tersedia secara lengkap. Oleh karena itu, data penelitian seluruhnya bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Path Analysis (analisis jalur) untuk menguji hubungan antarvariabel, termasuk pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, NTP, dan inflasi terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui PDRB sebagai variabel intervening (Creswell, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera dengan melihat nilai probability dari statistik Jarque-Bera.

Tabel 1. Uji Normalitas Model Pertama

Komponen	Nilai
<i>Mean</i>	1,04e-11
<i>Median</i>	4,308507
<i>Maximum</i>	4.477,663
<i>Minimum</i>	-4.010,361
<i>Std. Dev.</i>	2.240,028
<i>Skewness</i>	-0,029536
<i>Kurtosis</i>	2,820332
<i>Jarque-Bera</i>	0,022356
<i>Probability</i>	0,988884
<i>Observations</i>	15

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai statistik Jarque-Bera adalah 0,022356 dengan nilai probability sebesar 0,988884. Nilai probability tersebut jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), yang berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual model pertama terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi terpenuhi.

Tabel 2. Uji Normalitas Model Kedua

Komponen	Nilai
<i>Mean</i>	4,85e-11
<i>Median</i>	45,67507
<i>Maximum</i>	2.641,751
<i>Minimum</i>	-2.135,312
<i>Std. Dev.</i>	1.297,268
<i>Skewness</i>	0,067983
<i>Kurtosis</i>	2,594673
<i>Jarque-Bera</i>	0,114195
<i>Probability</i>	0,944502
<i>Observations</i>	15

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai statistik Jarque-Bera adalah 0,114195 dengan nilai probability sebesar 0,944502. Nilai probability tersebut jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%), yang berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual model kedua terdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana nilai VIF yang kurang dari 10 mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas yang serius.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas Model Pertama

Variabel	<i>Centered VIF</i>
UMP	1,225102
NTP	1,008709
Inflasi	1,219480

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai *Centered VIF* untuk semua variabel independen menunjukkan angka yang jauh di bawah 10. Variabel UMP memiliki nilai VIF sebesar 1,225102, variabel NTP memiliki nilai VIF sebesar 1,008709, dan variabel Inflasi memiliki nilai VIF sebesar 1,219480. Nilai-nilai VIF yang rendah ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pertama terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas Model Kedua

Variabel	<i>Centered VIF</i>
UMP	2,586679
NTP	2,547313
Inflasi	1,851429
PDRB	1,826192

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai Centered VIF untuk semua variabel independen menunjukkan angka yang jauh di bawah 10. Variabel UMP memiliki nilai VIF sebesar 2,586679, variabel NTP memiliki nilai VIF sebesar 2,547313, variabel Inflasi memiliki nilai VIF sebesar 1,851429, dan variabel PDRB memiliki nilai VIF sebesar 1,826192. Nilai-nilai VIF yang rendah ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model, sehingga dapat disimpulkan bahwa model kedua terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Model Pertama

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-2.653,050	7.257,560	-0,365557	0,7216
UMP	0,000467	0,000583	0,801076	0,4400
NTP	22,48258	69,75706	0,322298	0,7533
Inflasi	131,3076	81,11944	1,618695	0,1338

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai probability lebih besar dari 0,05. Variabel UMP memiliki nilai probability sebesar 0,4400, variabel NTP sebesar 0,7533, dan variabel Inflasi sebesar 0,1338. Nilai-nilai probability yang tinggi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pertama tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Model Kedua

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-5.405,677	4.517,381	-1,196640	0,2590
UMP	-0,011459	0,195090	-0,058737	0,9543
NTP	-4,162405	3,531115	-1,178779	0,2658
Inflasi	-9,201532	8,620226	-1,067435	0,3109
PDRB	0,011719	0,068370	0,171404	0,8673

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai probability lebih besar dari 0,05. Variabel UMP memiliki nilai

probability sebesar 0,9543, variabel NTP sebesar 0,2658, variabel Inflasi sebesar 0,3109, dan variabel PDRB sebesar 0,8673. Nilai-nilai probability yang tinggi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model kedua tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson.

Tabel 7. Uji Autokorelasi Model Pertama

Statistik	Nilai
<i>Durbin-Watson stat</i>	2,109029

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai Durbin-Watson statistik adalah 2,109029. Dengan jumlah observasi (n) = 15 dan jumlah variabel independen (k) = 3, nilai dL (batas bawah) adalah 0,814 dan nilai dU (batas atas) adalah 1,750 pada tingkat signifikansi 5%. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,109029 berada di antara dU (1,750) dan $4-dU$ (2,250), yang mengindikasikan bahwa model tidak mengandung autokorelasi positif maupun negatif.

Tabel 8. Uji Autokorelasi Model Kedua

Statistik	Nilai
<i>Durbin-Watson stat</i>	1,892207

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai Durbin-Watson statistik adalah 1,892207. Dengan jumlah observasi (n) = 15 dan jumlah variabel independen (k) = 4, nilai dL (batas bawah) adalah 0,685 dan nilai dU (batas atas) adalah 1,977 pada tingkat signifikansi 5%. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,892207 berada sedikit di bawah nilai dU (1,977), namun masih dalam rentang yang dapat diterima dan mendekati batas tidak ada autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Uji F Model Pertama

Statistik	Nilai
<i>F-statistic</i>	334,6310
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai F -statistic sebesar 334,6310 dengan probability 0,000000 menunjukkan bahwa secara simultan variabel UMP, NTP, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat signifikansi 5 persen. Dengan membandingkan nilai F -hitung (334,6310) dengan F -tabel pada $df_1=3$ dan $df_2=11$ sebesar 3,59, terlihat bahwa F -hitung jauh lebih besar dari F -tabel, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol ditolak. Ketiga variabel independen secara

bersama-sama memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi PDRB di Kalimantan Selatan.

Tabel 10. Uji F Model Kedua

Statistik	Nilai
<i>F-statistic</i>	72,90661
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai *F-statistic* sebesar 72,90661 dengan probability 0,000000 menunjukkan bahwa secara simultan variabel UMP, NTP, Inflasi, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada tingkat signifikansi 5 persen. Dengan membandingkan nilai *F*-hitung (72,90661) dengan *F*-tabel pada $df_1=4$ dan $df_2=10$ sebesar 3,48, terlihat bahwa *F*-hitung jauh lebih besar dari *F*-tabel, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol ditolak. Keempat variabel independen secara bersama-sama memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 11. Uji t Model Pertama

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	40.908,45	11.969,61	3,417692	0,0057
UMP	0,025653	0,000962	26,65693	0,0000
NTP	259,9048	115,0476	2,259106	0,0452
Inflasi	-498,2470	133,7872	-3,724176	0,0034

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB pada tingkat signifikansi 5 persen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probability yang harus lebih kecil dari 0,05. Persamaan model pertama sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 40.908,45 + 0,025653 \text{ UMP} + 259,9048 \text{ NTP} - 498,2470 \text{ Inflasi}$$

- Variabel UMP memiliki koefisien sebesar 0,025653 dengan *t*-statistic 26,65693 dan probability 0,0000. Nilai probability yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Koefisien positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan upah minimum sebesar Rp 1 akan meningkatkan PDRB sebesar Rp 0,025653 miliar, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Variabel NTP memiliki koefisien sebesar 259,9048 dengan *t*-statistic 2,259106 dan probability 0,0452. Nilai probability sebesar 0,0452 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa NTP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Koefisien positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin NTP akan meningkatkan PDRB sebesar Rp 259,9048 miliar, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Variabel Inflasi memiliki koefisien sebesar -498,2470 dengan *t*-statistic -3,724176 dan probability 0,0034. Nilai probability sebesar 0,0034 yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar

1 persen akan menurunkan PDRB sebesar Rp 498,2470 miliar, dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 12. Hasil Uji t Model Kedua

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	220.586,5	8.260,168	26,70484	0,0000
UMP	-1,565555	0,356728	-4,388650	0,0014
NTP	-14,57495	6,456751	-2,257319	0,0476
Inflasi	137,1535	15,76235	8,701340	0,0000
PDRB	-0,601676	0,125017	-4,812770	0,0007

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada tingkat signifikansi 5 persen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada $df=10$ sebesar 2,228 atau dengan melihat nilai probability yang harus lebih kecil dari 0,05. Persamaan model kedua yaitu sebagai berikut:

$$JPM = 220.586,5 - 1,565555 \text{ UMP} - 14,57495 \text{ NTP} + 137,1535 \text{ Inflasi} - 0,601676 \text{ PDRB}$$

- Variabel UMP memiliki koefisien sebesar -1,565555 dengan t-statistic -4,388650 dan probability 0,0014. Nilai probability yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan upah minimum sebesar Rp 1 akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,565555 jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Variabel NTP memiliki koefisien sebesar -14,57495 dengan t-statistic -2,257319 dan probability 0,0476. Nilai probability sebesar 0,0476 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa NTP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin NTP akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 14,57495 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Variabel Inflasi memiliki koefisien sebesar 137,1535 dengan t-statistic 8,701340 dan probability 0,0000. Nilai probability sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Koefisien positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 137,1535 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Variabel PDRB memiliki koefisien sebesar -0,601676 dengan t-statistic -4,812770 dan probability 0,0007. Nilai probability sebesar 0,0007 yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar Rp 1 miliar akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,601676 ribu jiwa, dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi Model Pertama

Statistik	Nilai
<i>R-squared</i>	0,989161

<i>Adjusted R-squared</i>	0,986205
---------------------------	----------

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai *R-squared* sebesar 0,989161 menunjukkan bahwa 98,92 persen variasi PDRB di Kalimantan Selatan dapat dijelaskan oleh variabel UMP, NTP, dan Inflasi, sedangkan sisanya sebesar 1,08 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Meskipun nilai *R-squared* yang sangat tinggi umumnya dapat menimbulkan kecurigaan adanya masalah dalam model, namun dalam konteks data time series dengan variabel-variabel ekonomi makro yang memiliki tren jangka panjang, nilai *R-squared* yang tinggi adalah hal yang wajar. Selain itu, semua uji asumsi klasik telah terpenuhi dan semua variabel independen signifikan secara statistik, sehingga nilai *R-squared* yang tinggi dapat diterima sebagai indikasi kualitas model yang baik.

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Kedua

Statistik	Nilai
<i>R-squared</i>	0,966846
<i>Adjusted R-squared</i>	0,953585

Sumber: E-Views 12, data diolah 2025

Nilai *R-squared* sebesar 0,966846 menunjukkan bahwa 96,68 persen variasi Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Selatan dapat dijelaskan oleh variabel UMP, NTP, Inflasi, dan PDRB, sedangkan sisanya sebesar 3,32 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai *R-squared* yang tinggi dalam konteks model kemiskinan ini adalah wajar karena variabel-variabel yang digunakan memang merupakan determinan utama kemiskinan menurut teori ekonomi. Upah minimum, nilai tukar petani, inflasi, dan PDRB secara bersama-sama mampu menjelaskan sebagian besar variasi kemiskinan karena variabel-variabel ini langsung mempengaruhi pendapatan dan daya beli masyarakat. Dengan terpenuhinya semua asumsi klasik dan signifikannya semua variabel independen, nilai *R-squared* yang tinggi dapat diterima sebagai indikasi kualitas model yang sangat baik.

Uji Sobel

Uji Sobel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi.

- a. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB

Dari hasil regresi, diperoleh:

- a (UMP $\rightarrow$ PDRB) = 0,025653
- Sa (standar error UMP $\rightarrow$ PDRB) = 0,000962
- b (PDRB $\rightarrow$ Jumlah Penduduk Miskin) = -0,601676
- Sb (standar error PDRB $\rightarrow$ Jumlah Penduduk Miskin) = 0,125017

Pengaruh tidak langsung (*indirect effect*):

$$= a \times b = 0,025653 \times (-0,601676) = -0,015431$$

Perhitungan standar error pengaruh tidak langsung:

$$= \sqrt{(b^2 \times Sa^2 + a^2 \times Sb^2)}$$

$$= \sqrt{(-0,601676)^2 \times (0,000962)^2 + (0,025653)^2 \times (0,125017)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(0,362014) \times (0,000000925444) + (0,000658) \times (0,015629)} \\
 &= \sqrt{0,000000335047 + 0,000010299} \\
 &= \sqrt{0,000010634} \\
 &= 0,003261
 \end{aligned}$$

Nilai z-hitung: $= (a \times b) / \text{standar error} = -0,015431 / 0,003261 = -4,732$

Nilai z-hitung sebesar -4,732 (nilai absolut 4,732) lebih besar dari z-tabel sebesar 1,96, yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung UMP terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB adalah signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Signifikansi pengaruh mediasi PDRB dalam jalur UMP terhadap Jumlah Penduduk Miskin mengindikasikan bahwa UMP tidak hanya berpengaruh langsung dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga berpengaruh tidak langsung melalui peningkatan PDRB.

b. Pengaruh NTP terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB

Dari hasil regresi, diperoleh:

- a (NTP $\rightarrow$ PDRB) = 259,9048
- Sa (standar error NTP $\rightarrow$ PDRB) = 115,0476
- b (PDRB $\rightarrow$ JPM) = -0,601676
- Sb (standar error PDRB $\rightarrow$ JPM) = 0,125017

Pengaruh tidak langsung (indirect effect): $= a \times b = 259,9048 \times (-0,601676) = -156,379$

Perhitungan standar error pengaruh tidak langsung:

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(b^2 \times Sa^2 + a^2 \times Sb^2)} \\
 &= \sqrt{[(-0,601676)^2 \times (115,0476)^2 + (259,9048)^2 \times (0,125017)^2]} \\
 &= \sqrt{[(0,362014) \times (13235,95) + (67550,51) \times (0,015629)]} \\
 &= \sqrt{4791,614 + 1055,827} = \sqrt{5847,441} = 76,469
 \end{aligned}$$

Nilai z-hitung: $= (a \times b) / \text{standar error} = -156,379 / 76,469 = -2,045$

Nilai z-hitung sebesar -2,045 (nilai absolut 2,045) lebih besar dari z-tabel sebesar 1,96, yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung NTP terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB adalah signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen.

c. Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB

Dari hasil regresi, diperoleh:

- a (Inflasi $\rightarrow$ PDRB) = -498,2470
- Sa (standar error Inflasi $\rightarrow$ PDRB) = 133,7872
- b (PDRB $\rightarrow$ JPM) = -0,601676
- Sb (standar error PDRB $\rightarrow$ JPM) = 0,125017

Pengaruh tidak langsung (indirect effect):

$$= a \times b = -498,2470 \times (-0,601676) = 299,748$$

Perhitungan standar error pengaruh tidak langsung:

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(b^2 \times Sa^2 + a^2 \times Sb^2)} \\
 &= \sqrt{[(-0,601676)^2 \times (133,7872)^2 + (-498,2470)^2 \times (0,125017)^2]} \\
 &= \sqrt{[(0,362014) \times (17899,02) + (248209,87) \times (0,015629)]} \\
 &= \sqrt{6479,488 + 3879,318} = \sqrt{10358,806} = 101,778
 \end{aligned}$$

Nilai z-hitung: $= (a \times b) / \text{standar error} = 299,748 / 101,778 = 2,945$

Nilai z-hitung sebesar 2,945 lebih besar dari z-tabel sebesar 1,96, yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB adalah signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Nilai

pengaruh tidak langsung sebesar 299,748 menunjukkan bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 299,748 ribu jiwa melalui penurunan PDRB terlebih dahulu.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, PDRB berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan pengaruh UMP, NTP, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Tabel 14. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Total Pengaruh

Variabel Independen	Pengaruh Langsung (c') ke Y	Pengaruh Tidak Langsung (a × b) melalui Z	Total Pengaruh (c' + ab)	Keterangan Mediasi
UMP → PDRB	0,025653	-	-	-
NTP → PDRB	259,9048	-	-	-
Inflasi → PDRB	-498,2470	-	-	-
UMP → Jumlah Penduduk Miskin	-1,56555	-0,015431	-1,58098	Signifikan
NTP → Jumlah Penduduk Miskin	-14,57495	-156,379	170,95395	Signifikan
Inflasi → Jumlah Penduduk Miskin	137,1535	299,748	436,9015	Signifikan
PDRB → Jumlah Penduduk Miskin	-0,601676	-	-	-

Berdasarkan hasil analisis jalur, variabel UMP, NTP, dan inflasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB. UMP berpengaruh positif terhadap PDRB sebesar 0,025653, NTP memberikan pengaruh positif yang sangat kuat sebesar 259,9048, sementara inflasi berpengaruh negatif terhadap PDRB sebesar -498,2470.

Terhadap jumlah penduduk miskin, UMP memiliki pengaruh langsung negatif sebesar -1,56555 dan diperkuat oleh pengaruh tidak langsung melalui PDRB sebesar -0,015431, sehingga total pengaruhnya menjadi -1,58098. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UMP, baik secara langsung maupun melalui peningkatan PDRB, berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin.

Variabel NTP menunjukkan pengaruh paling dominan. Pengaruh langsung NTP terhadap jumlah penduduk miskin sebesar -14,57495, sementara pengaruh tidak langsung melalui PDRB sangat besar, yaitu -156,379, sehingga total pengaruhnya mencapai -170,95395. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani melalui NTP secara signifikan menekan jumlah penduduk miskin, terutama melalui peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Pengaruh langsung inflasi sebesar 137,1535 dan pengaruh tidak langsung melalui PDRB sebesar 299,748, menghasilkan total pengaruh 436,9015. Ini menunjukkan bahwa kenaikan

inflasi, baik secara langsung maupun melalui pelemahan PDRB, cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin.

PDRB berpengaruh langsung negatif terhadap jumlah penduduk miskin sebesar $-0,601676$, yang berarti peningkatan PDRB secara langsung berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa PDRB berfungsi sebagai variabel mediasi yang signifikan, khususnya dalam memperkuat pengaruh NTP dan UMP serta memperbesar dampak inflasi terhadap jumlah penduduk miskin.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh UMP terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan koefisien $-1,565555$ dan *probability* $0,0014$. Temuan ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja sehingga membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari kemiskinan. Dampak tersebut semakin efektif apabila didukung pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan perusahaan terhadap standar upah. Pada 2024, UMP Kalimantan Selatan mencapai Rp3.282.812, meningkat sekitar $4,22\%$ dari tahun sebelumnya, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar $3,81\%$ pada Februari 2024 menunjukkan kondisi penyerapan tenaga kerja yang relatif baik. Kebijakan peningkatan UMP juga diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lavenia et al. (2023) yang menemukan pengaruh negatif signifikan UMP terhadap kemiskinan serta Jadoon et al. (2021) dan Rasyid & Sa'roni, (2023) yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat menekan kemiskinan, terutama apabila disertai peningkatan produktivitas dan kebijakan pendukung.

Pengaruh NTP terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan koefisien $-14,57495$ dan *probability* $0,0476$. Peningkatan NTP mencerminkan membaiknya pendapatan riil dan daya beli petani karena harga yang diterima relatif lebih tinggi dibandingkan harga yang harus dibayar. Kondisi tersebut memungkinkan petani memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan investasi pada pendidikan dan kesehatan keluarga, serta mengembangkan kapasitas produksi sehingga berpotensi mengurangi kemiskinan, khususnya di perdesaan. Temuan ini relevan bagi Kalimantan Selatan yang memiliki basis pertanian cukup besar. Pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas melalui hilirisasi pertanian dan Program Selamat (*Selamatkan Lahan Rawa Sejahterakan Petani*), termasuk optimalisasi lahan rawa di Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala. Hasil penelitian ini sejalan dengan Triatmo (2024) dan Salsabila & Yunani, (2023) yang menemukan bahwa NTP berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan koefisien $137,1535$ dan *probability* $0,0000$. Inflasi menurunkan daya beli riil masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan dasar.

Kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan pokok dapat menyebabkan rumah tangga rentan miskin jatuh ke bawah garis kemiskinan serta mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Untuk mengendalikan dampaknya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat peran TPID melalui pasar murah, operasi pasar, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), termasuk peningkatan produksi pangan lokal seperti cabai dan telur. Inflasi Kalimantan Selatan pada September 2024 berada sekitar 1,98% (*year-on-year*), sehingga relatif terkendali dalam menjaga daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Manangkalagi et al. (2020) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Pengaruh UMP terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dengan koefisien 0,025653 dan *probability* 0,0000. Temuan ini sesuai dengan teori ekonomi Keynesian yang menjelaskan bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga mendorong aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan UMKM. Meskipun demikian, kecilnya koefisien menunjukkan bahwa pengaruh UMP terhadap PDRB masih relatif terbatas karena struktur ekonomi Kalimantan Selatan masih didominasi sektor padat modal, terutama pertambangan. Pemerintah daerah mendorong penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU), pengembangan industri padat karya, hilirisasi pertambangan dan pertanian, pelatihan vokasi melalui BLK, serta digitalisasi UMKM. Pada 2024, UMP mencapai Rp3.282.812, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8–5,0% dan inflasi sekitar 1,98%. Temuan ini sejalan dengan Winarni et al. (2023) di Jambi dan Maysari (2021) di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa kenaikan UMP berpengaruh positif terhadap PDRB.

Pengaruh NTP terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, dengan koefisien 259,9048 dan *probability* 0,0452. Peningkatan NTP menunjukkan membaiknya daya beli dan kesejahteraan petani yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap pupuk, alat pertanian, transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya. Dengan demikian, peningkatan pendapatan petani dapat memberikan efek pengganda terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kalimantan Selatan mendukung sektor pertanian melalui subsidi pupuk, bantuan bibit unggul, hilirisasi produk, integrasi distribusi pangan menuju IKN, *smart farming*, serta pengembangan kawasan industri pangan dan halal. Pada 2024, NTP mencapai 114,83, berada di atas 100, yang menunjukkan kondisi kesejahteraan petani relatif baik dan turut mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Hasil penelitian ini sejalan dengan Haryati & Amri (2024) di Sumatera serta Elfira et al. (2022) di Aceh yang menemukan bahwa NTP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB atau nilai tambah sektor pertanian.

Pengaruh Inflasi terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, dengan koefisien -498,2470 dan *probability* 0,0034. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli, meningkatkan biaya produksi, mengurangi nilai riil investasi, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi sehingga menghambat

pertumbuhan PDRB. Ketika harga barang pokok dan biaya logistik meningkat, konsumsi rumah tangga dan margin usaha dapat menurun, terutama karena Kalimantan Selatan masih menghadapi ketergantungan terhadap distribusi pangan dari luar daerah. Pemerintah daerah melakukan pengendalian melalui GNPIP, peningkatan produksi pangan lokal, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah pemasok pangan, serta pembangunan *cold storage* dan gudang logistik sebagai *buffer stock*. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kontinuitas pasokan dan stabilitas harga. Temuan penelitian ini berbeda dengan Hannyfah et al. (2023) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB nasional selama pandemi, sehingga menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda menurut kondisi dan karakteristik wilayah.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung UMP terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung UMP terhadap jumlah penduduk miskin sebesar -1,56555, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui PDRB sebesar -0,015431, sehingga total pengaruh mencapai -1,58098. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan UMP secara keseluruhan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Pengaruh langsung terjadi melalui peningkatan pendapatan pekerja berupa rendah sehingga meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pengaruh tidak langsung berlangsung melalui peningkatan konsumsi, aktivitas perdagangan, UMKM, dan jasa yang selanjutnya mendorong PDRB. Mekanisme tersebut sejalan dengan teori ekonomi Keynesian bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong konsumsi agregat dan aktivitas ekonomi, serta *trickle-down effect* melalui penyebaran manfaat pertumbuhan kepada masyarakat. Besarnya pengaruh langsung yang lebih kuat dibandingkan pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa dampak UMP terhadap kemiskinan terutama berasal dari peningkatan pendapatan pekerja, sementara transmisi melalui pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas. Pemerintah Kalimantan Selatan dapat memperkuat efektivitas kebijakan melalui penetapan UMP yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan dunia usaha, penguatan UMKM, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hilirisasi industri padat karya, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemanfaatan peluang pembangunan IKN pada sektor logistik dan jasa. Dengan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 45–50% terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8–5,0%, kebijakan peningkatan upah berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan apabila disertai penciptaan lapangan kerja produktif.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung NTP terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB

Pengaruh langsung NTP terhadap jumlah penduduk miskin sebesar -14,57495, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui PDRB sebesar -156,379, sehingga total pengaruh mencapai -170,95395. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani memiliki pengaruh kuat dalam menurunkan kemiskinan, baik secara langsung melalui peningkatan pendapatan riil maupun secara tidak langsung melalui peningkatan produksi, distribusi, perdagangan, dan industri pengolahan yang

mendorong PDRB. Besarnya pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan ekonomi yang luas dalam struktur perekonomian Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah telah mendukung peningkatan NTP melalui optimalisasi lahan rawa melalui Program Selamat, peningkatan produktivitas, hilirisasi padi dan karet, serta pengembangan infrastruktur distribusi dan digitalisasi rantai pasok pertanian. Penguatan sektor pertanian juga dapat diarahkan untuk memanfaatkan peluang IKN sebagai pasar pangan, sehingga meningkatkan permintaan dan nilai tambah produk pertanian. Capaian NTP sebesar 114,83 pada 2024 menunjukkan bahwa petani berada pada kondisi surplus relatif terhadap harga yang dibayar. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan sektor pertanian merupakan strategi penting dalam menurunkan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung inflasi terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 137,1535, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui PDRB sebesar 299,748, sehingga total pengaruh mencapai 436,9015. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan inflasi meningkatkan kemiskinan, baik secara langsung melalui penurunan daya beli maupun secara tidak langsung melalui tekanan terhadap PDRB. Pengaruh tidak langsung yang lebih besar menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak hanya membebani rumah tangga miskin, tetapi juga meningkatkan biaya produksi, mengurangi konsumsi riil, dan menekan aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini memperlihatkan tingginya sensitivitas masyarakat berpendapatan rendah terhadap perubahan harga, terutama pangan dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah, kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan, pengembangan *buffer stock*, *cold storage*, serta digitalisasi distribusi pangan. Penguatan produksi pangan lokal dan energi alternatif juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dan biaya energi dari luar daerah. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya penting untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk mempertahankan pertumbuhan PDRB dan mencegah peningkatan kemiskinan.

Pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan koefisien -0,601676 dan *probability* 0,0007. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta peningkatan kapasitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Mekanisme tersebut sesuai dengan konsep *trickle-down effect*, di mana pertumbuhan sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan sektor unggulan lainnya menciptakan aktivitas ekonomi turunan seperti perdagangan kecil, transportasi, jasa, dan UMKM yang melibatkan masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah daerah berupaya menjaga kualitas pertumbuhan melalui hilirisasi industri, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta pemanfaatan posisi Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN dalam sektor logistik, perdagangan, jasa, dan pangan. Pertumbuhan PDRB sekitar 4,8–5,1% pada 2024 dan tingkat kemiskinan

sekitar 4,11% menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit tetap menjadi tantangan karena fluktuasi harga komoditas dapat memengaruhi pertumbuhan PDRB dan berpotensi meningkatkan kembali kemiskinan.

Pengaruh Simultan UMP, NTP, Inflasi, dan PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa UMP, NTP, inflasi, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh keterkaitan berbagai faktor ekonomi, bukan hanya satu variabel. UMP dan NTP merepresentasikan kemampuan pendapatan pekerja dan petani, inflasi mencerminkan stabilitas daya beli, sedangkan PDRB menggambarkan kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan output, pendapatan, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kesejahteraan petani, pengendalian harga, dan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara terpadu karena perubahan masing-masing variabel dapat memengaruhi kemiskinan melalui jalur langsung maupun tidak langsung. Hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat multidimensional dan terintegrasi.

Pengaruh Simultan UMP, NTP, dan Inflasi terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP, NTP, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika upah, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga secara bersama-sama menjadi faktor penting dalam menentukan aktivitas ekonomi daerah. UMP dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga, NTP mendorong kesejahteraan petani serta aktivitas sektor pertanian, sedangkan inflasi yang tinggi berpotensi menurunkan daya beli dan meningkatkan biaya produksi. Secara teoritis, hubungan tersebut memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan agregat, kondisi sektoral, dan stabilitas harga. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan sektor pertanian, dan pengendalian inflasi agar pertumbuhan PDRB dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UMP, NTP, dan inflasi berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan. UMP dan NTP berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya, UMP, NTP, inflasi, dan PDRB berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kemiskinan. UMP, NTP, dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan analisis jalur dan uji Sobel, PDRB terbukti memediasi secara signifikan pengaruh UMP, NTP, dan inflasi terhadap kemiskinan, sehingga PDRB berperan sebagai mekanisme yang menyalurkan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Saran

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menjadikan peningkatan NTP sebagai salah satu prioritas pengurangan kemiskinan melalui perlindungan harga hasil pertanian, subsidi pupuk dan benih yang tepat sasaran, efisiensi distribusi sarana produksi, serta penguatan hilirisasi pertanian agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan pertanian juga perlu diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan sehingga petani miskin menjadi sasaran utama pemberdayaan produktif. Selain itu, pengendalian inflasi daerah perlu diperkuat melalui optimalisasi TPID, pengembangan cadangan pangan berbasis komoditas lokal, perbaikan distribusi dan logistik antarwilayah, serta sinkronisasi kebijakan harga konsumen dan produsen agar peningkatan NTP dan UMP tidak tergerus oleh kenaikan harga. TKPKD Kalimantan Selatan juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan bantuan sosial, pemberdayaan UMKM berbasis pertanian, perikanan, dan perkebunan, peningkatan kapasitas rumah tangga miskin, serta monitoring berbasis indikator NTP, inflasi, dan kemiskinan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti pengangguran, pendidikan, IPM, investasi, dan belanja pemerintah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, disertai peningkatan kualitas dan transparansi data antarinstansi agar perencanaan dan evaluasi kebijakan lebih akurat dan berbasis bukti.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan memasukkan pengangguran, pendidikan, IPM, belanja sosial pemerintah, dan ketimpangan pendapatan agar dimensi struktural kemiskinan dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Penelitian juga dapat menggunakan data panel kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik kemiskinan serta kesenjangan pembangunan antarwilayah. Selain itu, penggunaan metode ekonometrika dinamis seperti ARDL, VECM, atau GMM dapat dipertimbangkan untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Pendalaman terhadap PDRB sektoral juga diperlukan untuk mengidentifikasi sektor yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan. Selanjutnya, integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara dengan petani, pelaku UMKM, dan pemangku kebijakan dapat dilakukan agar hasil penelitian lebih kontekstual dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Elfira, E., Silvia, V., & Nasir, M. (2022). The Effect of Farmer's Export, Import, and Exchange Rate on Value-Added of Agricultural Sector in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Finance, Economics and Business*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v1i2.24>
- Fatimah, S., & Sa'roni, C. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 585–599.
- Hannyfah, M., Tasri, E. S., Yenti, C. D., & Zai, Y. K. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi,

- Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap PDRB di Indonesia Era Pandemi Covid-19. *Economic Development*, 1(1), 34–45.
- Haryati, R., & Amri, K. (2024). Pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP), Konsumsi, Pariwisata, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Sumatera. *Agustus*, 1(2), 110–133. <https://journal.alifba.id/index.php/jiei/about>
- Jadoon, A. K., Tanveer, A., Javed, M. F., & Sarwar, A. (2021). Minimum Wages and Poverty : A Cross-Country Analysis. *Asian Economic and Financial*, 11(8), 632–643. https://www.researchgate.net/publication/353923371_Minimum_Wages_and_Poverty_A_Cross-Country_Analysis
- Lavenia, L., Mandai, S., & Muhammad Yudhi Lutfi. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 319–328. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15412>
- Manangkalagi, L. K., Masinambow, V. A. J., & Tumilaar, R. L. H. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 66–78.
- Maysari, N. E. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor, UMP, dan PMA Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 247–261.
- Mellor, J. W. (2017). Agricultural Development and Economic Transformation. In *Agricultural Development and Economic Transformation*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65259-7>
- Priyono, P., & Ismail, Z. (2012). Teori Ekonomi. In *Dharma Ilmu*. <https://doi.org/10.4337/9781843768715.00061>
- Rasyid, A., & Sa'roni, C. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 663–670.
- Salsabila, S. N., & Yunani, A. (2023). Pengaruh Bantuan Raskin, PDRB dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Se-Benua Enam. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1109–1118.
- Sayuti, R. H., & Taqiuddin, M. (2020). Performance Analysis of Agriculture Sector in Alleviating Poverty on West. *AGROTEKSOS: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 30(April), 11–17.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Sulistiawan, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(01), 115–126. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.22271>
- Syafrina, L. H. (2023). Analisis Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1), 53–62.
- Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 169–184.

- <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50990>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Triatmo, W., & Pt, S. (2024). Pengaruh Indikator Pertanian Terhadap Kemiskinan Jawa Tengah. *E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 8(2), 507–519.
- Wibowo, A. (2022). Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak Kerja. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Winarni, E., Sari, Y., & Amali, M. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB Perkapita Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1182. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1394>
- Wiryawan, K. J., & Pratiwi, I. A. M. (2024). Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan dan IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 198–224. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.405>